



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I. YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febri Nurdian Satriatama
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah

Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan Hukum

Febri Nurdian Satriatama
NIP. 198202282006041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I. YOGYAKARTA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Wilayah	1. Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan yang diberikan Kanwil Kementerian Hukum sesuai dengan permohonan	1 Laporan
		2. Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang selesai diharmonisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100%
2.	Tersusunnya Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah	Jumlah rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah di wilayah	1 Rekomendasi (5 Perda)
3.	Terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	1. Jumlah pemberian layanan Bantuan Hukum Litigasi	202 Orang
		2. Jumlah pemberian layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	26 Kelompok Masyarakat
4.	Terlaksananya pembinaan pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum di wilayah	Jumlah Anggota JDIH yang dibina di Wilayah Kerja Kantor Wilayah	9 Lembaga
5.	Terlaksananya pembinaan dan/atau pendampingan pos bantuan hukum di wilayah	Jumlah pos bantuan hukum yang dibina dan/atau didampingi	100 Lembaga
6.	Tersedianya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang diselesaikan	2 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 282.912.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 261.354.000,-
Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp. 21.558.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.680.723.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 1.680.723.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 69.118.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp. 69.118.000,-

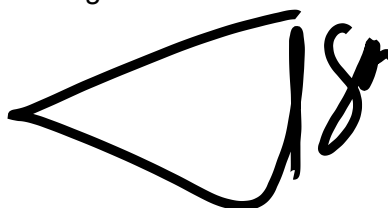
Yogyakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah



Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum



Febri Nurdian Satriatama
NIP. 198202282006041001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I. YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febri Nurdian Satriatama

Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah D.I.Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Febri Nurdian Satriatama
NIP. 198202282006041001